

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	: SMP Dikpora Gunungkidul
Kelas/Semester	: VII/1
Mata Pelajaran	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Topik	: Proses Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara.
Alokasi Waktu	: 1 x 10 menit
Pertemuan Ke-	: 1

A. Kompetensi Dasar	B. Indikator Pencapaian Kompetensi	Pert Ke..
3.1 Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara.	3.1.1 Mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Sidang BPUPKI. 3.1.2 Membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila.	1
C. Tujuan Pembelajaran		Pert. ke
3.1.1 Siswa dapat mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Sidang BPUPKI. 3.1.2 Siswa dapat membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila.		1

D. Materi, Media dan Sumber Belajar

Materi Pembelajaran	Alat & Media	Sumber Belajar
<p>Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara.</p> <p>Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara, Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara Indonesia Para pendiri negara, telah merumuskan dan menetapkan dasar negara. Hal itu dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dasar negara Pancasila berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia</p>	<p>Alat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Leptop, b. Smartphone. c. Google Slide d. Google Meet, e. Google Classroom, f. Whatsapp <p>Media :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ringkasan/peta materi b. Gambar lambang negara c. Gambar Sidang BPUPKI d. Gambar Mr. Muh. Yamin, Mr. Supomo dan Ir. Sukarno 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. Buku Siswa Kelas VII. <i>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan</i>. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesiab.Cet ke-3 (edisi revisi). 2. Kementrian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. 2016. Buku Guru Kelas VII. <i>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 3. Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (2009).Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jendral MPR RI.

E. Pendekatan pembelajaran & Langkah-langkah Pembelajaran

No	Kegiatan: Meliputi kegiatan Tatap Muka (TM), Penugasan Terstruktur (PT), dan Kegiatan Mandiri (KM)	Sintaks Tahapan *)	TM/ PT/ KM	Waktu
Pertemuan 1				
a.	Pendahuluan 1) Pengkondisian peserta didik: salam, berdoa, presensi 2) Memberikan motivasi belajar siswa 3) Mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari: Penagihan penugasan sebelumnya, Tanya jawab, kuis 4) Penjelasan nama, kompetensi, indikator, tujuan 5) Penyampaian skenario garis garis besar kegiatan pembelajaran		TM	1
b.	Kegiatan Inti 1) Siswa membaca bacaan tentang proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Sidang BPUPKI dan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila.	<i>Mengamati</i>	PT	1
	2) Siswa memformulasikan pertanyaan tentang proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Sidang BPUPKI dan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila.	<i>Menanya</i>	TM	1
	3) Siswa mencermati ide dasar tentang dasar degara yang digagas oleh Ir. Sukarno dan membandingkan ide ide naskah dasar negara yang diajukan oleh Mr. Muh. Yamin, Mr. Supomo dan Ir. Sukarno	<i>Mengumpulkan informasi</i>	TM	2
	4) Siswa mencatat perbedaan rumusan dasar negara dari para tokoh pendiri negara yakni Mr. Muh. Yamin, Mr. Supomo dan Ir. Sukarno	<i>Menganalisis</i>	TM	2
	5) Siswa menuliskan kesimpulan hasil akhir rumusan dasar negara	<i>Mengomunikasikan</i>	TM	2
c.	Penutup 1) Penyimpulan dan evaluasi rangkaian pembelajaran 2) Umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 3) Tindak lanjut dan Penugasan 4) Penyampaian informasi pertemuan yang akan datang 5) Berdoa dan salam		TM PT KM	1

*) Tahapan bisa diselesaikan dalam 1 pertemuan atau lebih

F. Penilaian Sikap, Pengetahuan, Keterampilan (a. Kisi-kisi, b. Instrumen, c. Rubrik/Panduan Penilaian)

- 1) Kisi-kisi (Lampiran ...)
- 2) Instrumen (Lampiran ...)
- 3) Pedoman Penskoran/ kunci jawaban/ Rubrik (Lampiran ...)

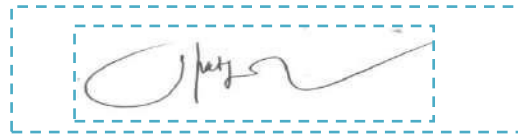
G. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan

a. Remedial Peserta: semua siswa yang belum tuntas. Materi yang tidak tuntas	b. Pengayaan Peserta: siswa yang sudah mencapai KKM Materi pengembangan
--	---

Wonosari, 30 April 2021

Mengetahui :
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran



NIP.

Sugeng Bagyo
NIP. 196108181982121002

Lampiran 1 Bacaan dan rujukan

Proses Perumusan Pancasila Dalam Sidang Pertama BPUPKI

Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada 29 Mei-1 Juni 1945. Membahas tentang rancangan dasar negara. Dalam sidang tersebut ada 3 usulan tentang dasar negara, antara lain Moh. Yamin, Soepomo, Ir. Soekarno. Pada tgl 1 Juni Soekarno mengusulkan agar dasar negara tsb dinamakan Pancasila. Setelah usulan tsb diterima, BPUPKI akan mengadakan reses (istirahat) selama 1 bulan. tetapi sebelum reses BPUPKI membentuk panitia kecil yg berjumlah 8 orang yg diketuai oleh Soekarno. Pada tgl 22 Juni panitia 8 bertemu dg anggota BPUPKI dalam pertemuan tsb berhasil membentuk panitia 9. Panitia 9 berhasil menyusun maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka. kemudian Rumusan itu dinamakan Piagam Jakarta, dalam piagam Jakarta dicantumkan rumusan dasar negara Indonesia.

Rumusan Pancasila Menurut Mr. Muhammad Yamin



Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan lima dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut.

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Sosial

Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang, konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas INFO Kewarganegaraan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami empat kali perubahan (amandemen) secara bertahap oleh MPR RI, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 7 dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila Menurut Mr. Soepomo



Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Soepomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut.

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Soepomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat (golongan politik atau ekonomi yang paling kuat). Akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat.

Rumusan Pancasila Menurut Ir. Soekarno



Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulannya berbentuk fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya

didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Dengan berdasar pada Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut.

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Ir. Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar Negara tersebut bukan dinamakan Panca Dharma. Atas petunjuk seorang teman ahli bahasa, rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan Negara Indonesia yang kekal dan abadi

Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia Kecil beranggotakan delapan orang di bawah pimpinan Ir. Soekarno, dengan anggota terdiri atas Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kyai Haji Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin, Sutardjo Kartohadikoesoemo, A.A Maramis, Otto Iskandardinata, dan Drs. Mohammad Hatta

Panitia sembilan mengadakan rapat di rumah kediaman Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar (Undang-Undang Dasar) yang disebut dengan Mukadimah yang pada akhirnya disepakati untuk diubah menjadi "*Piagam Jakarta atau Jakarta Charter*" yang pada tanggal 14 Juli 1945 telah disepakati oleh BPUPKI

Rumusan Pancasila Menurut Piagam Jakarta

Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut.

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila Menurut Pembukaan UUD 1945

Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah "Piagam Jakarta" tersebut, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa"

Dengan demikian, rumusan dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Lampiran 2 Kisi-kisi

a. Kisi-kisi

NO. KD	Materi	Indikator	Teknik	Bentuk	No. Soal	Waktu Penilaian
1. Kompetensi Sikap Spiritual						
1.1	Bersyukur kepada Allah	1.1.1. Siswa mengungkapkan rasa syukur	Pengamatan	Jurnal	*)	Saat pembelajaran berlangsung
2. Kompetensi Sikap Sosial						
2.1.	Disiplin	2.1.1 Siswa berdisiplin dalam memasuki google classroom	Pengamatan	Jurnal	*)	Saat pembelajaran berlangsung
	Kerjasama	2.1.2 Siswa menunjukkan kerjasama dalam berdiskusi	Pengamatan	Jurnal	*)	
3. Kompetensi Pengetahuan						
3.1.	Proses Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai dasar Negara	3.1.1	Tertulis	Isian singkat	1-2	Setelah pembelajaran usai
		3.1.2	Tertulis	Isian singkat	3	
			Tertulis	Menganalisis dengan tabel	4	
4. Kompetensi Keterampilan						
4.9	Proses Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai dasar Negara	3.1.1	Tertulis	Menganalisis dengan tabel		Setelah pembelajaran usai
		3.1.2.	Tertulis	Menganalisis dengan tabel		
		Jumlah			4	

Lampiran 3 Soal

1. Deskripsikan proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Sidang BPUPKI, yang meliputi :
 - a. Kapan sidang pertama BPUPKI dilakukan,
 - b. Jumlah Usulan Rancangan Dasar Negara,
 - c. Nama Dasar negara yang diusulkan Ir. Sukarno dan
 - d. Apakah nama Panitia yang akan ditugasi untuk membahas Rancangan Dasar Negara itu, siapa ketuanya dan berapa orang jumlah anggotanya

2. Bandingkanlah ketiga usulan/pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila, yang meliputi
 - a. Mr Muhammad Yamin
 - b. Mr. Soepomo
 - c. Ir. Sukarno

3. Analisislah persamaan dan perbedaan dari ketiga tokoh pendiri negara di atas dan tuangkan kedalam tabel berikut :

No.	Nama Tokoh Pendiri Negara	Dengan Tokoh	Perbedaan	Persamaan
1.	Mr. Muh. Yamin	Mr. Soepomo		
		Ir. Sukarno		
2.	Mr. Soepomo	Mr. Muhammad Yamin		
		Ir. Soekarno		
3.	Ir. Soekarno	Mr. Muhammad Yamin		
		Mr. Soepomo		

Lampiran 4 Pedoman penilaian

Kunci Jawaban

1. Deskripsi proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Sidang BPUPKI, yang meliputi :
 - a. Sidang pertama perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara oleh BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945
 - b. Jumlah Usulan Rancangan Dasar Negara adalah tiga usulan
 - c. Nama Dasar negara yang diusulkan Ir. Sukarno Adalah Pancasila
 - d. Nama Panitia yang akan ditugasi untuk membahas Rancangan Dasar Negara itu adalah Panitia 9 yang diketuai oleh Ir. Soekarno dengan anggota sebanyak 8 orang
2. Usulan/pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila, adalah sebagai berikut :
 - a. Mr Muhammad Yamin
Pancasila :
 1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 2. Kebangsaan persatuan Indonesia
 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - b. Mr. Soepomo
Pancasila :
 1. Persatuan
 2. Kekeluargaan
 3. Keseimbangan lahir dan batin
 4. Musyawarah
 5. Keadilan rakyat
 - c. Ir. Sukarno
Pancasila :
 1. Kebangsaan Indonesia
 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan
 3. Mufakat atau demokrasi
 4. Kesejahteraan sosial
 5. Ketuhanan yang berkebudayaan
3. Persamaan dan perbedaan dari ketiga tokoh pendiri negara di atas dan tuangkan kedalam tabel berikut :

No.	Nama Tokoh Pendiri Negara	Dengan Tokoh	Perbedaan	Persamaan
1.	Mr. Muh. Yamin Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang	Mr. Soepomo Pancasila : 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir dan batin 4. Musyawarah 5. Keadilan rakyat	1. Tidak ada ketuhanan 2. Menggunakan istilah persatuan 3. Kemanusiaan diistilahkan keseimbangan lahir bati 4. Menggunakan istilah keadilan rakyat 5. Menggunakan istilah kekeluargaan	1. Ada istilah kebangsaan dan kerakyatan 2. Ada istilah musyawarah

	dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	Ir. Sukarno Pancasila : 1. Bangsa Indonesia 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan	1. Menggunakan istilah Ketuhanan berkebudayaan 2. Menggunakan istilah internasionalisme 3. Menggunakan istilah kesejahteraan sosial 4. Ada mufakat dan demokrasi	1. Menggunakan istilah Bangsa 2. Mengatur juga tantangan Ketuhanan 3. Mengatur kemanusiaan
2.	Mr. Soepomo Pancasila : 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir dan batin 4. Musyawarah 5. Keadilan rakyat	Mr. Muhammad Yamin Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Bangsa persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	1. Tidak ada ketuhanan 2. Menggunakan istilah persatuan 3. Kemanusiaan diistilahkan keseimbangan lahir batin 4. Menggunakan istilah keadilan rakyat 5. Menggunakan istilah kekeluargaan	1. Ada istilah kebangsaan dan kerakyatan 2. Ada istilah musyawarah
		Ir. Soekarno Pancasila : 1. Bangsa Indonesia 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan	1. Tidak menggunakan istilah persatuan tetapi menggunakan istilah kebangsaan 2. Musyawarah diistilahkan dg mufakat dan demokrasi 3. Menggunakan istilah kekeluargaan 4. Tidak mengatur keadilan	Keadilan diistilahkan dengan keseimbangan lahir batin
3.	Ir. Soekarno Pancasila : 1. Bangsa Indonesia 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan	Mr. Muhammad Yamin Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Bangsa persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	1. Menggunakan istilah Ketuhanan berkebudayaan 2. Menggunakan istilah internasionalisme 3. Menggunakan istilah kesejahteraan sosial 4. Ada mufakat dan demokrasi	1. Menggunakan istilah Bangsa 2. Mengatur juga tantangan Ketuhanan 3. Mengatur kemanusiaan
		Mr. Soepomo 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir dan batin 4. Musyawarah 5. Keadilan rakyat	1. Tidak menggunakan istilah persatuan tetapi menggunakan istilah kebangsaan 2. Musyawarah diistilahkan dg mufakat dan demokrasi 3. Menggunakan istilah kekeluargaan 4. Tidak mengatur keadilan	Keadilan diistilahkan dengan keseimbangan lahir batin

